

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dinamika global yang sangat cepat dan dinamis menciptakan dampak signifikan terhadap negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Perubahan lingkungan internasional merujuk pada tata multipolar, dimana tidak ada satupun kekuatan absolut yang mendominasi untuk mengontrol lingkungan internasional. Perubahan yang terjadi, juga memberikan peluang besar bagi banyak negara untuk berperan aktif dalam skenario perkembangan internasional, salah satunya adalah Indonesia, merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik wilayah yang didominasi oleh perairan. Karakteristik tersebut, memiliki potensi tinggi sebagai negara maritim. Terutama, sebagian besar wilayah perairan merupakan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Namun, dengan potensi yang tinggi sebagai sebuah negara maritim, lingkungan strategis yang dimiliki, juga memunculkan potensi ancaman pertahanan. Sehingga perlu upaya khusus untuk memberikan alternatif pengelolaan tata ruang wilayah.¹

Secara geografis, negara Indonesia memiliki posisi sentral dalam peta dunia, yang menghubungkan samudra hindia dan samudra pasifik. Hal ini, memiliki pengaruh signifikan bagi perkembangan negara ini kedepannya dan menjadi salah satu tantangan

¹ Darmansjah Djumala et al., "Indonesia's Strategy in Southeast Asian Geopolitics," *Croatian International Relations Review* 28, no. 91 (2023): 98–113, <https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0066>.

dalam pelaksanaan pertahanan nasional. Kepemilikan bentuk fisik wilayah kepulauan Indonesia, juga memiliki dampak signifikan pada stabilitas regional. Terutama, pada sektor perairan yang berada dipersimpangan jalur pelayaran internasional. Bentuk fisik kepulauan, menjadikan negara ini sebagai titik vital bagi negara-negara produsen di Kawasan Asia Timur dan Australia. Kepemilikan bentuk wilayah yang unik dan posisi yang strategis perlu menjadi fokus kajian dalam proses tata negara. seorang ahli strategi maritim Alferd Mahan, menjelaskan bahwa negara yang memiliki karakteristik perairan yang mendominasi membutuhkan keseimbangan kekuatan pertahanan maritim. Alferd Mahan juga mengatakan bahwa keunggulan strategis atas posisi geografis suatu negara memerlukan proyeksi kapasitas kekuatan pertahanan yang sesuai karena dapat mempengaruhi pelaksanaan pertahanan nasional.²

Di abad 21, perkembangan dinamika pertahanan dan keamanan memberikan cukup banyak perhatian karena dampak yang diciptakan sangatlah kompleks. Melihat kompleksitas dinamika internasional, pada tahun 2014, presiden Joko Widodo mengemukakan gagasan transformatif sebagai respon atas dinamika internasional dengan ambisi pembangunan nasional Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ambisi pembangunan nasional, Indonesia sebagai poros maritim dunia, membutuhkan pertimbangan yang mendalam dalam proses pelaksanaannya. Terutama, kondisi lingkungan internasional yang kompleks dan dinamis menciptakan tingginya potensi

² Captain A. T. Mahan, "The Influence of Sea Power 1660 - 1783 - Capt Alfred Mahan, USN" (Boston, 1890).

ancaman bagi perkembangan pertahanan di Indonesia. Ditambah juga, dengan munculnya aktor non-negara yang menyulitkan negara dalam memecahkan permasalahan. Pertumbuhan teknologi salah satunya, yang berkembang cukup pesat di abad ini menciptakan dinamika yang sensitif dalam studi hubungan internasional. Dengan itu, pemenuhan kebutuhan pertahanan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi negara dalam merumuskan strategi yang proporsional untuk menjaga kepentingan nasional. Kemampuan pertahanan yang proporsional bagi sebuah negara akan mampu menetralsisir kompleksitas ancaman yang muncul atas perubahan lingkungan. Kapasitas pertahanan yang proporsional juga membantu negara untuk menciptakan ruang strategis yang aman, terbebas dari ancaman baik tradisional atau non-tradisional.³ Dalam studi keamanan global, dinamika internasional yang dinamis juga menyebabkan revolusi aktor yang membawa keterlibatan aktor non-negara andil dalam permasalahan global. Dimana hal ini menyebabkan kompleksitas ketidakpastian perkembangan lingkungan yang melahirkan stigma negatif bagi sebagian setiap negara. kondisi ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat memicu konflik ketegangan antar negara.⁴

Kompleksitas lingkungan internasional diprediksi akan menjadi salah satu scenario perang dimasa depan. Sehingga, pada tahun 2014 presiden joko Widodo memutuskan untuk membangun Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Konsep poros maritim

³ Indra Kusumawardhana Dan Frieska Haridha, "Garuda In Southeast Asia's Contested Waters: Indonesia Dan Dinamika Keamanan Maritim Asia Tenggara," *Indonesian Perspective* 5, No. 1 (2020): 1–27.

⁴ Kris Wijoyo Soepandji, "Geopolitik, negara, dan bangsa masa kini," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 37 (2019): 41–58, <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/50/12/>.

merupakan, *grand desain* yang diciptakan untuk merespon dan mengoptimalkan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam kerangka kerja pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa poros maritim merupakan upaya dalam mengintegrasikan target pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian menuju level menengah dan meningkatkan pertahanan negara yang mampu memiliki daya saing skala global demi kepentingan nasional.⁵ Dalam perspektif hukum internasional, UNCLOS 1982, menyebutkan bahwa negara kepulauan memiliki hubungan dengan kebebasan pelayaran, kedaulatan perairan serta hak lintas bagi perdagangan internasional yang mendukung Indonesia dalam mewujudkan visi ini.⁶ Namun, dukungan atas hukum kedaulatan perairan, tidak cukup kuat untuk membantu Indonesia dalam menjawab kesiapan masyarakat. Terutama, untuk membangun sebuah negara maritim dibutuhkan kapasitas kekuatan yang sangat kompleks, melibatkan berbagai bidang seperti sektor teknologi, ekonomi, politik sosial, pertahanan dan keamanan. Melihat kondisi Indonesia dalam visi ini, kapasitas pertahanan yang dimiliki, sangat minim untuk mewujudkan kepentingan pembangunan. Maka, negara membutuhkan sebuah instrument yang kuat sebagai modal dalam mencapai kepentingan nasional tersebut. Kebutuhan kapasitas pertahanan yang kuat dan tangguh baik dari segi instrument atau implementasinya, akan

⁵ Probo Darono Yakti Dan Joko Susanto, "Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesenambungan Strategi?," *Jurnal Global & Strategis* 11, No. 2 (2018): 108.

⁶ UNCLOS, "united nations convention on the law of the sea," *Ocean Development and International Law* 26, no. 4 (1995): 391–412, <https://doi.org/10.1080/00908329509546068>.

memberikan dampak signifikan dalam menjaga kedaulatan negara dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki sebagai modal dalam mendorong kepentingan nasional.

Namun, melihat minimnya kapasitas pertahanan yang dimiliki, menjelaskan bahwa kapasitas dalam operasional pertahanan nasional masih lemah dimana dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran pada wilayah Indonesia. Alasan yang paling menguatkan dalam kasus ini adalah pengelolaan lingkungan yang tidak efektif dan minimnya kapasitas alusista dalam proyeksi kekuatan pertahanan yang tidakseimbang. Sehingga, hal ini menciptakan probelmatika dalam pelaksanaan pertahanan nasional. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan visi Indonesia sebagai poros maritim dibutuhkan sebuah upaya perubahan yang efektif dilakukan berkelanjutan dalam membangun postur pertahanan nasional untuk menjaga kepentingan nasional dan keutuhan wilayah kedaulatan.

Dinamika kedaulatan nasional, menjadi salah satu fokus bagi pemerintahan Joko Widodo, dengan diterbitkan peraturan presiden No. 16 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa poros maritim dunia merupakan visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat maju dan mandiri untuk memberikan kontribusi bagi pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan nasional dan perdamaian dunia.⁷ Diharapkan dengan visi tersebut, merupakan momentum untuk memulai perubahan dengan komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan sektor kemaritiman

⁷ Perpres_16_Tahun_2017..

sebagai penguat perekonomian dan integritas nasional. Namun, pemerintah perlu memahami kompleksitas perkembangan politik internasional yang menjadi salah satu faktor untuk meminimalisir terjadinya ketegangan dan munculnya konflik antar negara. Mengingat, posisi Indonesia yang sentra di dalam lingkup Indopasifik, faktor-faktor lain juga perlu pertimbangan terutama sektor ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan.⁸ Faktor tersebut juga menjadi sebuah alternatif pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memanfaatkan wilayah negara kesatuan republik Indonesia lebih terstruktural, proporsional dan berkelanjutan.

Maka, untuk melihat secara mendalam dinamika yang muncul atas lingkungan internasional terhadap posisi Indonesia, dan proses pelaksanaan pertahanan nasional, dibutuhkan alternatif lain seperti optimalisasi pengelolaan wilayah yang berpotensi untuk mendorong perekonomian dan peningkatan kekuatan pertahanan yang memiliki dampak signifikan dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.⁹ Bagi Indonesia, poros maritim merupakan sebuah ambisi transformatif yang diciptakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kapasitas pertahanan. Namun, dengan kondisi wilayah Indonesia di kawasan Indopasifik membutuhkan sinergitas kebijakan dan strategi dalam mewujudkan Poros Maritim tidak hanya memiliki tujuan dalam kepentingan ekonomi. Namun juga penguatan dalam peningkatan kapasitas pertahanan terutama dalam mengontrol wilayah perairan (*sea power*).

⁸ Muhamad Jaki Nurhasya, "Konsepsi Indo-Pasifik Sebagai Sebuah Strategi Ketahanan Politik Luar Negeri Indonesia," *Jurnal Kajian Lemhannas Ri* 6, No. 1 (2018): 65–76.

⁹ Kemhan Ri, "Kebijakan Maritim Dalam Mendukung Poros Maritim Dunia," No. 9 (2018): 1–28.

Dalam pandangan Geopolitik, gagasan poros maritime merujuk pada kekuatan maritim yang kuat dan tangguh menjadi sebuah pondasi arah kepentingan nasional (*nasional interest*).¹⁰ Sesuai rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN) Tahun 2015-2019, visi poros maritime dunia yang telah dirumuskan Joko Widodo perlu disusun sebuah kebijakan yang tepat sesuai dengan tiga pilar pembangunan nasional di antaranya *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-growth* yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun lingkungan strategis (domestic atau Internasional). Perencanaan yang diperlukan juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan proses yang berkelanjutan meliputi; rencana jangka pendek, rencana menengah dan rencana jangka panjang yang sesuai dengan agenda visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan ini dibutuhkan sebagai dasar komitmen dan implemtasi pelaksanaan dan keputusan yang memungkinkan dalam mencapai tujuan.¹¹

Maka, kajian mengenai kebijakan pertahanan indoensia dalam visi poros maritim menjadi penting dan menarik karena kebijakan ini tidak hanya mencakup perkembangan negara kedepanya namun juga menggambarkan scenario perkembangan lingkungan global. Kompleksitas perkembangan internasional, menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan untuk memberikan peluang lebih efektif

¹⁰ Safira, Nurfitri Nungrahaningsih, Dan Viza Juliansyah, “Analisis Faktor-Faktor Geopolitik Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia (Pmd) Melalui Kawasan Indo-Pasifik,” *Sovereign Jurnal Hubungan Internasional*, 2021, 517–39.

¹¹ D A Mamahit, “Mewujudkan Sistem Pertahanan Dan Keamanan Laut Dalam Pencapaian Visi Poros Maritim Dunia Dan Tantangan Lima Tahun Kedua Dalam Rangka Percepatan Dan Penguatan Implementasi Indonesia Sebagai Negara Maritim Dan Poros Maritim Dunia,” *Jurnal Maritim Indonesia* (2020): 60–70.

dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai poros maritim merupakan sebuah gagasan yang sangat kompleks dan tranfor matif bagi Indonesia untuk menjadi dasar kepentingan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas peneliti menarik rumusan masalah “*analisis kebijakan pertahanan Indonesia dalam visi poros maritim pemerintahan joko widodo tahun 2014-2019 dalam persepektif geopolitik?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang terdiri atas beberapa pokok diantaranya:

1. Mengidentifikasi pertahanan, strategi dan agenda prioritas pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
2. Menganalisis kebijakan pertahanan dan tantangan Indonesia dalam mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
3. Menganalisis faktor-faktor geopolitik dan menggabarkan strategi yang mendukung kebijakan pertahanan dalam visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memperkuat pemahaman dan menambah kajian teoritis mengenai tata negara terutama terkiat proses perumusan

kebijakan pertahanan. Penelitian ini juga, memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai geopolitik, yang mana dapat menjadi inspirasi para pembaca nantinya untuk melakukan penelitian serupa. Penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan bahan kajian baru bagi studi Hubungan Internasional baik terkait konsep yang digunakan atau studi kasus dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapkan nantinya penelitian ini dapat menjadi wawasan pendukung untuk memahami perkembangan fenomena hubungan internasional khususnya wilayah kedaulatan Indonesia dan kawasan Asia-Pasifik mengenai pertahanan dan keamanan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian dengan fokus kajian yang sama yang telah dilakukan sebelumnya. penelitian-penelitian tersebut merupakan sumber acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Pada penelitian ini, terdapat beberapa sampel dari penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dasar dalam menyelesaikan penelitian ini, diantaranya:

Penelitian pertama adalah penelitian jurnal yang dilakukan oleh **Gunawan Santoso, Aim Abdulkarim, Bunyamin Maftuh, Sapriya dan Ma'mun Murod** yang berjudul *Kajian Ketahanan Nasional melalui Geopolitik dan Geostrategi Indonesia*

*Abad 21.*¹² Pada penelitian ini dijelaskan perkembangan pesat dari dinamika politik internasional menimbulkan pengaruh besar pada sektor pertahanan dan keamanan. Perkembangan politik internasional yang sangat cepat, menimbulkan efek signifikan terhadap perputaran politik global yang dinamis. Perkembangan yang dinamis dari lingkungan global, melahirkan pengaruh terhadap pertahanan nasional dan pertumbuhan negara dengan memanfaatkan ketidakstabilan pergerakan politik yang sangat dinamis juga memberikan arah pergerakan negara menjadi tidak terkendali dalam memenuhi kebutuhan nasional seperti sumberdaya, perdagangan dan pengembangan senjata. Dengan ini, ketahanan nasional merupakan kunci utama dalam mempertahankan eksistensi negara dari tantangan lingkungan global yang sangat dinamis.

Perkembangan yang cepat di abad ke-2, telah memberikan sebuah penegasan bagi negara sebagai model aktor, bahwa perlu mempertimbangkan banyak faktor dalam pengambilan keputusan, terutama dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, sosial budaya, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam tata negara. Sehingga, model aktor negara membutuhkan pengetahuan dalam berbagai bidang untuk memahami fenomena yang terjadi khususnya untuk bidang pertahanan dan keamanan. Problematika dalam perkembangan lingkungan internasional tidak hanya memberikan banyak tantangan dan hambatan bagi sebuah negara seperti kekurangan sumber daya yang berkualifikasi untuk menyelesaikan

¹² Gunawan Santoso Et Al., “Kajian Ketahanan Nasional Melalui Geopolitik Dan Geostrategi Indonesia,” Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra) 02, No. 01 (2023): 184-96.

banyaknya tantangan yang muncul di abad ini.

Perkembangan lingkungan menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang kondisi geopolitik pada abad ke-21 akan membantu aktor dalam memberikan respon yang efektif dan proporsional, baik dalam mengidentifikasi potensi masalah atau menggambarkan kepentingan nasional yang mempengaruhi keamanan dan stabilitas nasional. Selain itu, pemahaman geopolitik, juga dapat memberikan saran dan strategi kepada pemerintah dan masyarakat tentang bagaimana meningkatkan ketahanan nasional dan mempromosikan kepentingan nasional.

Sehingga, dalam penelitian ini, perbedaan dalam penelitian ialah keterkaitan posisi geografis Indonesia sebagai strategi dalam perumusan kebijakan pertahanan dalam mengupayakan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sedangkan penelitian pertama lebih ditujukan pada peran penting ketahanan nasional dalam memahami dinamika geopolitik sebagai referensi dalam membangun pertahanan di abad ke-21. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah melihat desain kebijakan pertahanan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sektor laut merupakan sektor yang sangat vital bagi Indonesia.

Dengan demikian, Kemaritiman adalah kunci utama sektor perekonomian dan pertahanan dimana seluruh distribusi barang ditransfer melalui sektor wilayah ini. Dengan ini fokus penelitian nantinya akan digunakan untuk melihat “*sea power*” yang akan membantu dalam meningkatkan pertahanan nasional Indonesia dalam sektor kemaritiman. Sedangkan dalam penelitian pertama terfokus pada pertahanan negara yang disebabkan dari kompleksitas yang ada dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara sebagai benteng akan ancaman yang akan muncul kedepannya dan menghambat pertumbuhan nasional.

Penelitian Kedua berjudul *Perubahan Geopolitik Dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelasan Teoritikal* disusun oleh **Kusnanto Anggoro**.¹³ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan pengaruh perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan peranan penting kekuatan dalam geopolitik. Perkembangan yang pesat dari teknologi menghasilkan dampak yang signifikan bagi peradaban umat manusia khususnya dalam bidang transportasi, komunikasi, dan informasi. Namun, disisi lain perkembangan teknologi juga menimbulkan kontraksi geografis, memperpendek jarak, dan menjadi kekuatan pendorong keharmonisan sosial, ketertiban politik, dan keamanan nasional.

Dalam perkembangan sejarah Indonesia, negara ini tidak pernah kebal akan pengaruh eksternal dari masa hindu hingga masuknya pasukan colonial. Bahkan hingga kini, budaya strategis masih berada dalam bayangan colonialism atas berbagai sektor dan banyak melibatkan sektor asing dalam pengelolaan ruang kedaulatan negara. Dimana hal ini, menimbulkan efek yang signifikan dalam kehidupan social terutama bisa menciptakan gejolak ancaman yang berkelanjutan. Peran negara menjadi kunci utama dalam dinamika ini, Terutama memahami ancaman yang muncul pada sebuah wilayah yang berbatasan secara langsung dengan wilayah negara lain lebih rawan akan munculnya dinamika yang membuat sebuah tantangan baru. Penguatan ketahanan

¹³ Santoso Et Al.

nasional merupakan tanggung jawab bagi suatu negara, karena memiliki tingkat sensitif yang tinggi. Dalam negara Indonesia sendiri, karakteristik masyarakat yang beragam dengan berbagai latar belakang kebudayaan, aktor negara perlu memiliki kepekaan tinggi sebagai sikap responsif dan antisipatif sebagai motto pengerak negara untuk mendesain kebijakan yang proporsional. Dalam persepektif hubungan internasional, negara perlu untuk memiliki program efisiensi dalam management peningkatan sumber daya nasional dan pelaksanaan instrumen nasional yang efektif untuk meminimalisir adanya tantangan yang menghambat pertumbuhan negara. sehingga, perlu adanya sebuah kerangka strategis yang di gunakan sebagai pondasi untuk menjawab dinamika perkembangan sebuah negara untuk tetap ada dan berkelanjutan

Perkembangan dinamika sebuah negara juga dipengaruhi oleh faktor faktor geografis. Ruang geografis dianggap sebuah tantangan serius dalam sektor ketahanan nasional. Desain ketahanan nasional akan dibutuhkan yang lebih kreatif dan efektif sebagai yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan, termasuk integrasinya ke dalam kebijakan keamanan nasional, agar bisa bertahan, maju, dan berkembang menjadi negara bangsa yang utuh. Oleh sebab ini, penelitian ini akan menjelaskan mengenai relasi yang dilahirkan dari perkembangan geopolitik terhadap pertahanan sebuah negara sebagai desain instrument menjaga ketahanan nasional sebuah negara. Dalam menjawab permasalahan yang muncul yang disebabkan karena geopolitik sebuah negara perlu bagi negara memiliki rencana (*planning*) yang membutuhkan kebijakan dan keputusan yang tepat untuk perubahan besar dan mendasar yang dilakukan dengan bertahap.

Grandplan akan menjadi sebuah instrument kebijakn yang menjadi keputusan politik untuk membawa sebuah negara diarahkan. Dengan ini berdirinya sebuah negara tidak hanya sebatas membangun sebuah kesejahteraan namun juga perlu untuk mempertahankan keutuhan sebuah negara. Dengan demikian, penelitian ini akan menambahkan sebuah rencana yang dapat menjadi instrument perkembangan geopolitik indonesia untuk menjaga keutuhan dan meminimalisir adanya ancaman yang vital bagi pertumbuhan bangsa ini. berdirinya sebuah negara ialah untuk menjaga keutuhan wilayah dan memberikan jaminan aman bagi segenap insan yang hidup dalam wilayah tersebut. Sehingga, dibutuhkan sebuah rencana besar untuk memaksimalakn arah gerak dari sebuah negara.

Penelitian Ketiga berjudul **Information Technology Design Tni Al Guna Mendukung Strategi Pertahanan Laut Nusantara** yang ditulis oleh **I Nengah Putra Aprianto**.¹⁴ Dalam menjelaskan hakekat dinamika yang ada dalam kancah internasional, buku ini memberikan sebuah paradig baru bagi pertahanan negara. salah satu elemen penting pertahanan nasional, kerangka pertahanan harus merujuk pada jaminan rasa aman terhadap warga negara. pertahanan nasional membutuhkan desain yang kokoh yang mampu menghalau sebuah ancaman baik bersifat ancaman negara (*nations threat*) bergeser menjadi sebuah ancaman non-negara (*non-nation threat*). Perkembangan tekonologi yang tinggi melahirkan sebuah tantangan baru bagi perkembangan sebuah negara. Beberapa ancaman tersebut diantaranya adalah Senjata

¹⁴ M.Si Dr. I Nengah Putra Aprianto, "Information Technology Design Tni Al Guna Mendukung Strategi Pertahanan Laut Nusantar," 2018.

Penghancur Massa (*Weapons of Mass Destructions*), *Electronic Warfare*, *Computer Warfare*, *Mine Warfare*, *Urban and Guerilla Warfare* dan Terorisme (*Terrorism*). Pada ancaman *Non Traditional* terdapat *Asymmetric Warfare*.

Perubahan ancaman tersebut, membuat negara saat ini tidak sekedar membutuhkan aktor-aktor yang berani dan kuat, tetapi juga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi pada penggunaan teknologi alutsista dan strategi militer modern dengan mengedepankan berbagai perhitungan serta pemikiran yang jauh ke depan. Hal ini diperoleh dari ilmu militer modern, baik *operation analysis* maupun *measure of effectiveness* dan dituntut memiliki kemampuan dalam Information Technology. Dalam rangka meminimalisir adanya ancaman, peran teknologi informasi yang masuk dalam kehidupan peradaban umat manusia akan menjadi sangat penting dan dibutuhkan terutama organisasi militer atau substansi terkait masalah teknologi dan informasi.

Perkembangan teknologi saat ini melahirkan berbagai masalah yang cukup kompleks yang berbasis pada teknologi dan informasi. Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap ruang kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. lahirnya teknologi juga menimbulkan ancaman nirmiliter berbasis Teknologi dan Informasi antara lain kejahatan cyber dan ketergantungan terhadap produk negara lain. Sehingga, penangkalan untuk menghadapi ancaman nirmiliter berbasis Teknologi dan Informasi, negara perlu meningkatkan kemampuan unsur pertahanan seperti peningkatan sumber daya manusia dan tersedianya industri nasional yang proporsional

yang secara bertahap dikembangkan untuk memposisikan diri dalam kemampuannya menuju NCW (*Network Centric Warfare*). Oleh sebab itu, sektor pertahanan menjadi sangat eksklusif yang bertanggung jawab dalam mengupayakan desain pertahanan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi untuk membendung ancaman yang lahir dari perkembangan teknologi informasi.

Dengan ini, para aktor militer perlu memahami tata kelola dan manajemen teknologi informasi guna mengetahui tingkat kemampuan dan kematangan serta rekomendasi yang digunakan dalam proses perumusan rancangan pembangunan kekuatan dan kemampuan teknologi informasi yang mencakup sasaran, strategi, arah kebijakan, kebutuhan dan aktifitas bisnis, kebutuhan IT, aplikasi, infrastruktur IT, arsitektur IT dan sistem keamanan IT serta menemukan model kerangka acuan dalam proses perumusan rencana dan rancangan yang mampu mendukung dan selaras dengan Strategi Pertahanan sebuah negara. Dengan ini, penelitian tersebut hanya akan mendeskripsikan mengenai desain postur yang akan digunakan untuk meningkatkan kerangka strategis dalam membangun kekuatan sebuah negara dalam rangka menjaga kedaulatan dengan dukungan teknologi informasi untuk mencapai kesejahteraan berbangsa dan bernegara.

Perbedaan dalam penelitian, dalam penelitian ini fokus kajiannya ialah dinamika perkembangan teknologi yang berdampak dalam perumusan desain pertahanan nasional. sedangkan dalam penelitian ini, penulis menjelaskan perumusan pertahanan dalam menggambarkan perumusan kebijakan pertahanan untuk mengetahui

arah kerangka kebijakan yang akan dilaksanakan. Perkembangan teknologi yang lahir telah membantu perkembangan negara dan menjawab permasalahan yang akan muncul kedepannya. Terutama dalam kebijakan pertahanan kemaritiman nusantara untuk mempertahankan dan membangun citra dalam kancah internasional. Dalam visi pros maritime dunia, kebijakan pertahanan merupakan instrument yang harus dipahami oleh masyarakat karena merupakan pondasi utama dalam menghalang tantangan yang akan muncul dari pergeseran pengaruh politik internasional yang mencakup pada pengelolaan ruang batas yuridiksi nasional yang merupakan komponen dalam mempertahankan keutuhan sebuah negara.

Penelitian Keempat berjudul *Kebijakan Maritime Dan Keamanana Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan* ditulis oleh *Safril Hidayat Dan Ridwan*.¹⁵

Dalam penelitiannya mengkaji mengenai potensi sektor maritim di Indonesia dengan objek kepemilikan kapasitas kelautan dalam pengimplemntasian nawa cita indonesia sebagai poros maritim dunia. Penelitian menggunakan kualitatif dengan fokus pada implemtasi kebijakan poros maritime indonesia. Dalam penelitian ini kondisi geografis indoensia merupakan nilai plus untuk mengembalikan semangat dalam berbangsa dan bernegara dalam membangun sebuah negara maritim. Berlandasakan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Indonesia sebagai poros maritim dunia ditopang dengan lima pilar

¹⁵ Safril Hidayat Dan Universitas Subang, “Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan,” 2017, 107–21.

utama. *pertama*, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; *kedua*, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; *ketiga*, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim;

keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan; dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritime. Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, Indonesia memiliki peluang besar sebagai bagian dari poros maritim dunia karena letak geografisnya berada di daerah ekuator, antara dua benua, Asia dan Australia, antara dua samudera, Pasifik dan Hindia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Mengimplementasikan kebijakan poros maritim memerlukan *political will* dan komitmen semua pihak untuk mensukseskannya. Kebijakan poros maritim melalui pembangunan tol laut dengan 24 dermaga baru akan meningkatkan intensitas pelayaran baik nasional maupun internasional.

Dalam perspektif kesejahteraan (*prosperity*) meningkatnya intensitas pelayaran tersebut diharapkan sejalan dengan meningkatnya intensitas perdagangan sehingga dapat menumbuhkan perekonomian dan mempercepat terhubungnya seluruh wilayah

Indonesia khususnya pulau-pulau terdepan dan terluar. dari perspektif keamanan, maka kebijakan poros maritim juga memerlukan penguatan pada aspek pertahanan. Kebijakan keamanan nasional dalam menjalankan kebijakan poros maritim tentu perlu mempertimbangkan ancaman internal maupun eksternal, dan tentu saja menelaah dengan seksama kebijakan global yang telah diratifikasinya Secara domestik kehadiran unsur pertahanan negara yang sejalan dengan kebijakan poros maritim dapat meningkatkan nasionalisme dan patriotisme masyarakat di perbatasan, pulau-pulau terdepan, dan terluar. Laut merupakan basis kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan dari Talaud sampai Rote, sekaligus masa depan mereka. Konektivitas merupakan kata kunci untuk mencapai kemajuan dan meraih cita-cita mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Kepulauan Nusantara. Pelabuhan menjadi penghubung dan hub yang menghidupkan dan menghubungkan berbagai pulau, dari yang terdekat hingga terpencil, dari pusat pemerintahan sampai perbatasan wilayah negara tetangga.

Penelitian Kelima berjudul **Perumusan Strategis Penguasaan Industry Maritime Untuk Memperkuat Pertahanan Negara** ditulis oleh *Nurchahya Dwi Asmoro, Budi Setiarso Dan Sukarno*.¹⁶ Penelitian ini menggunakan *Mixed Method Research (MMR)* yaitu pendekatan gabungan kualitatif deskriptif kepustakaan atau juga populer dengan sebutan penelitian bibliografis dengan kuantitatif. Dalam

¹⁶ Nurchahya Dwi Asmoro, Budi Setiarso, Dan Sukarno Sukarno, "Perumusan Strategi Penguasaan Industri Maritim Untuk Memperkuat Pertahanan Negara," *Jurnal Optimasi Sistem Industri* 17, No. 2 (2018): 162–70.

penelitiannya dilaksanakannya sebuah pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dari segala jenis ancaman dari luar dan dalam pada sebuah negara. kesiapan sebuah negara dalam menghadapi tantangan akan memberikan sebuah benteng pelindung dengan disusunnya sebuah strategi pertahanan negara. dalam menjalankan rencana strategis penulis menjelaskan empat langkah strategis yang menjadi tonggak utama diantaranya: *pertama*, sebuah negara melaksanakan pertahanan yang mampu menghadapi ancaman baik militer atau non-militer dengan maksud untuk menjaga wilayahnya secara yuridiksi yang di dukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri. *kedua*, Pertahanan terdiri dari tiga komponen yaitu komponen utama adalah TNI dan komponen cadangan berupa sumber daya yang disiapkan untuk mobilisasi dalam memperkuat komponen utama, dan komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang digunakan untuk mendukung komponen utama dan cadangan.

Komponen pendukung seperti Industri nasional merupakan sarana pendorong pertumbuhan perekonomian nasional agar mampu mengejar ketinggalan dari negara lain yang sudah lebih dahulu maju. Dengan kedua langka tersebut maka negara mampu menjalankan langkah ketiga yaitu negara mampu bersaing dalam skala internasional dengan capaian telah menjadi negara industri yang tangguh yang di dukung dengan kekayaan sumberdaya yang melimpah. Dengan karakteristik geografi yang terdiri atas 2/3 wilayahnya berupa perairan, menyimpan potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah berupa hasil tambang, cadangan ikan, potensi wisata alam dan lain-lain,

sangat penting bagi negara ini, untuk mengembangkan pengelolaan secara sinergi antar sektor. Dukungan alat angkut dengan output berupa modal transportasi kapal, dimana kapal merupakan alat/sarana yang vital dalam mendukung semua sektor tersebut.

Dalam hal ini Industri maritim perkapalan dapat menjadi acuan yang dikategorikan sebagai bagian dari infrastruktur nasional, karena pentingnya keberadaan kapal bagi suatu negara. Industri perkapalan, galangan kapal termasuk pelayaran merupakan industri strategis yang penting untuk dikelola dengan campur tangan pemerintah. Dorongan untuk mengembangkan industri berbasis maritim datang dari Kementerian perindustrian. Hal ini memang dimaksudkan untuk memajukan perekonomian. Langkah yang *ke-empat* ialah dukungan Kebijakan pemerintah untuk membangun industri maritim merupakan peluang bagi para pelaku industri di sektor ini termasuk juga para investor dari luar negeri. Dengan ini strategi untuk penguasaan Industri maritim dalam negeri dapat di lakukan dengan meningkatkan dan memperbanyak pembangunan sarana prasarana pelabuhan, dan meningkatkan kemampuan pembangunan armada kapal buatan dalam negeri. Tentunya hal ini harus didukung oleh SDM yang berkualitas yang disertai dengan pembenahan manajemen agar lebih baik.

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan seluruh pelaku angkutan barang dan jasa dalam negeri untuk menggunakan kapal yang dikelola oleh perusahaan dalam negeri merupakan sebuah peluang yang sangat besar untuk menghidupkan dan membesarkan industri maritim tanah air. Dalam penelitian ini penulis menekan pada

strategi untuk meningkatkan pertahanan sebuah negara yang di dukung oleh keberadaan infrastructure dan kebijakn pemerintah pusat sebagai aktor dalam menjalankan arah sebuah bangsa. Dengan ini, penelitian ke enam akan menjadi sebuah alternative pemerintah untuk meningkatkan dukungan kebijakan yang dapat digunakan sebagai dorongan dalam peningkatan sektor maritim. Maka yang membedakan penelitian ini, dengan penelitian ke-enam ialah strategi penerapan kebijakan yang di upayakan oleh pemerintah dalam membangun kekuatan maritim dari nawacita Presiden Joko Widodo Dodo dalam mendesaind Indonesia sebagai poros maritime dunia. Langkah langkah strategis akan membantu penelitian untuk menggambarkan point penting dalam industry maritime yang nantinya akan dilanjutkan degan rencana strategis untuk membangun sebuah rencana jangka panjang dalam menerapkan nawa cita indonesia sebagai poros maritime dunia yang menjadi sebuah pondasi dalam memperkuat ketahanan nasional.

Penelitian Keenam berjudul *Peran Transportasi Laut Pada Poros Maritime Dalam Mengurangi Disparitas Antar Wilayah Di Indonesia* yang ditulis oleh **Adenathera L Dewa, Izza Mafruhah, dan Indah Susilowati**.¹⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa sektor maritim nasional masih menyisakan beberapa persoalan yang harus diselesaikan. Pertama, Pelabuhan yang memiliki peranan penting bagi peningkatan ekonomi nasional, namun keberadaan dan kondisi menunjukkan bahwa

¹⁷ L D Adenathera, Izza Mafruhah, Dan Indah Susilowati, "Peran Transportasi Laut Pada Poros Maritim Dalam Pengurangan Disparitas Antar Wilayah Di Indonesia," *Menumbuhkan Ekonomi Lokal: Bukan Seperti Cendawan Di Musim Hujan*, No. 1 (2018): 93–104.

Indonesia belum mempunyai pelabuhan dengan sistem tata kelola yang efektif. Dalam menilai keefektifan pelabuhan, dapat dilihat dari Indikator kinerja pada pelabuhan komersial utama menunjukkan keseluruhan sistem pelabuhan. Salah satu indikator utama yaitu tingkat okupansi tambatan kapal, dengan rata-rata waktu persiapan perjalanan pulang (*turn-around*) dan waktu kerja masih berada di bawah standar internasional dan mengindikasikan bahwa kapal-kapal terlalu banyak menghabiskan waktu di tempat tambatan kapal atau untuk mengantri di luar pelabuhan.

Menurut laporan Bappenas, kepemilikan transportasi laut Indonesia mempunyai 4% dari kebutuhan transportasi perairan Indonesia dimana hal ini merupakan nilai minus dari sebuah negara kepulauan. Ketiga, posisi *Global Competitiveness Index (GCI)* Indonesia. GCI merupakan penilaian yang dilakukan oleh World Economic Forum terhadap 12 pilar yaitu pilar *institutions*, pillar infrastructure pillar macroeconomic environment, pillar health and primary education, pillar higher education and training, pilar goods market efficiency, pilar labor market efficiency, pilar 8 financial market development, pilar 9 technological readiness, pilar 10 market size, pilar 11 business sophistication, pilar 12 innovation.

Berdasarkan pilar dalam GCI tersebut, kondisi Indonesia selama dua tahun terakhir dibandingkan dengan negara ASEAN. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Perhubungan mengestimasi bahwa nilai potensi ekonomi nasional dari aktivitas transportasi laut adalah sebesar US\$ 20 miliar per tahun, sementara sampai tahun 2011 tercatat PDB sektor transportasi laut baru mencapai Rp

18.5 milyar (US\$ 1,95 milyar) atau hanya sekitar 9,7 % dari nilai potensi. Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan sektor perhubungan laut belum optimal memacu pertumbuhan ekonomi aktivitas transportasi laut nasional. Temuan ini menguatkan bahwa potensi transportasi laut belum terkelola dengan baik membutuhkan kebijakan tata kelola yang tepat agar dapat tumbuh secara efisien dan mampu bersaing dengan pelayaran asing.

Tata kelola kelautan merupakan proses interaksi antara sektor publik dan sektor privat yang dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan kelautan serta meningkatkan potensi kondisi sosial ekonomi di bidang kelautan, misalnya peningkatan peluang kerja, peningkatan pendapatan, pelestarian sumberdaya dan lain sebagainya. Konsep ini menunjukkan bahwa tata kelola mempunyai wilayah pemikiran yang lebih luas karena persoalan kelautan merupakan persoalan publik yang harus diselesaikan melalui interaksi komprehensif antara sektor publik dan privat, dimana sektor publik biasanya menjadi domain pemerintah, sedangkan sektor privat menjadi domain pelaku pemanfaatan sumberdaya kelautan.

Kesenjangan ekonomi antar wilayah merupakan salah satu permasalahan utama di negara berkembang. Salah satu indikator kesenjangan adalah Gini Rasio yaitu ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna) dikhawatirkan akan menyebabkan permasalahan sosial yang memicu perpecahan. World Bank telah mengidentifikasi adanya keberadaan empat faktor penyebab

meningkatnya kesenjangan ekonomi tersebut, yaitu 1) *inequality of opportunity* (ketidaksamaan kesempatan); 2) *Unequal jobs* (ketidaksamaan dalam pekerjaan); 3) *High wealth concentration* (terkonsentrasinya aset pada kelompok kaya); 4) *low resiliency* (rendahnya resiliensi).

penelitian ke enam ini, bertujuan untuk menjabarkan urgensi dari point-point mengenai tata kelola industri kemaritiman yang menjadi faktor utama perekonomian dan keamanan kemaritiman. Tujuan dari penelitian ke enam memberikan gambaran akan mekanisme kerja transportasi laut yang sangat rentan akan terjadinya kecelakaan yang dapat mengganggu aktifitas perekonomian atau bahkan terganggunya pasokan barang dimana hal ini akan menjadi kerugian bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. dengan faktor faktor yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, yang membedakan ialah negara perlu memberikan jaminan dini terhadap transportasi yang masuk dalam teritorial sebuah negara untuk memberikan rasa aman yang di khawatirkan oleh berbagai negara dalam melakukan aktifitas pada sektor maritime. Dengan ini peneliti menarik permasalahan yaitu kebijakan pertahanan dan keamanan maritime dalam mengidentifikasi ancaman dalam sektor maritime untuk melakukan upaya dini dalam mewujudkan kebijakan poros maritime.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No.	Nama dan judul penelitian	Jenis penelitian	Hasil penelitian
1.	Gunawan Santoso, Aim Abdulkarim , Bunyamin Maftuh , Sapriya , Ma'mun	Penelitian kualitatif dengan metode gabungan antara	kompleksitas tantangan dan ancaman yang berpengaruh pada stabilitas nasional sebagai upaya dalam menguatkan ketahanan

	Murod yang berjudul “Kajian Ketahanan Nasional melalui Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Abad 21”.	study literature dan wawancara	nasional dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi, politik dan sumberdaya.
2.	perubahan geopolitik dan ketahanan nasional: sebuah penjelasan teoritikal ditulis oleh Kusnanto Anggoro	Metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisa grounded theory	perkembangannya globalisasi dan transferteknologi yang begitu pesat memberikan ruang tanpa batas (unboundary space) sebuah paradigm baru mengenai pandangan atas negara nasional (nations state). perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan peranan penting berupa kekuatan dorongan dalam geopolitik menyebabkan kontraksi geografis, memperpendek jarak, dan menjadi kekuatan pendorong keharmonisan sosial, ketertiban politik, dan keamanan nasional.
3.	Buku “Information Technology Design Tni Al Guna Mendukung Strategi Pertahanan Laut Nusantara” ditulis oleh I Nengah Putra Aprianto	Analisis deskriptif dengan mix method teknik analisa observasi SWOT dan studi dokument	peningkatan pengolahan sektor maritime membutuhkan model kerangka kebijakan pengembangan teknologi informasi berdasarkan CobiT (Control Objectives for Information and Related Technologies) yang mencakup sasaran, strategi, arah kebijakan, kebutuhan yang mendukung pelayanan dan kewajiban TNI AL mengimplementasikan pertahanan laut nusantara (SPLV).
4.	asfril hidayat dan ridwan dengan judul “kebijakan maritime dan keamanana nasional indonesia: tantangan dan harapan”	Penelitian kalitatif dengan pendektana fenomenologi	kebijakan poros maritim memerlukan <i>political will</i> dan komitmen semua pihak untuk mensukseskannya. Dalam perspektif keamanan, kebijakan poros maritim juga memerlukan penguatan pada aspek pertahanan dengan mempertimbangkan ancaman internal maupun eksternal,

			dan tentu saja menelaah dengan seksama kebijakan global yang telah diratifikasinya.
5.	nurchaya dwi asmoro, budi setiarso dan sukarno judul penelitian Perumusan Strategis Penguasaan Industry Maritime Untuk Memperkuat Pertahanan Negara	penelitian bibliografis dengan kuantitatif menggunakan Mixed Method Research (MMR)	Industry maritim Indonesia membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan ruang fasilitas yang lengkap dengan sarana prasarana yang mendukung aktivitas perekonomian. Potensi yang dihasilkan dari industry maritime akan menjadi peluang besar untuk menunjukkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Dibutuhkan kebijakan yang mendukung kuatnya industry kemaritiman diantaranya: menyediakan spare part dari dalam negeri, menumbukan SDM kemaritiman, dan kebijakan yang merujuk pada kemaritiman indonesia.
6.	Adenathera L Dewa, Izza Mafruhah, dan Indah Susilowati judul penelitian peran transportasi laut pada poros maritime dalam mengurangi disparitas antar wilayah di Indonesia.	Penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka	Kemaritiman Indonesia masih menyisakan beberapa persoalan yang harus diselesaikan seperti Pelabuhan eksisting condition. Hal menunjukkan bahwa Indonesia belum mempunyai pelabuhan dengan sistem tata kelola yang proporsional. Pemerintah perlu mengupayakan Disparitas antar wilayah di Indonesia membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan holistik, bukan hanya pembangunan infrastruktur namun juga kualitas jaringan antar wilayah yang terbangun melalui transportasi laut.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Geopolitik

Geopolitik merupakan sebuah study penggabungan antara geografi dan politik, dimana pokok kajiannya mencakup aspek perbatasan, kekuasaan pertahanan dan keamanan. Secara konsep, study geopolitik menjelaskan tentang bagaimana dinamika antara manusia dan komunitas politik berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam lingkungan internasional. Geopolitik memiliki prinsip pengorganisasian struktur geografis yang menekan pada hubungan antara dinamika politik dan kepentingan sebuah negara berdasarkan faktor- faktor geografi (*struggle, people dan space*) sebagai dasar analisisnya. Martin jones mendefinisikan geopolitik sebagai sebuah *cluster of work* dalam sebuah ilmu sosial, dimana hubungan antara politik dan geografi memiliki keterkaitan satu sama lain.¹⁸



Gambar 1. 1 gambaran segitiga cluster of work hubungan geografi dan politik

Sumber: buku Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi 2017:8

¹⁸ 2017 J. Priyono & P. Yusgiantoro, *Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi*, ed. oleh M.Si (Han) dan Juniawan Priyono, S.Si. dan Ph.D. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A. (Bogor, n.d.).

Berdasarkan konfigurasi segitiga tersebut, dapat dilihat bahwa satu sisi segitiga memuat element ilmu politik mencakup kekuasaan, politik dan kebijakan. Kekuasaan merupakan hal utama dalam menompang dua element lain. Politik didefinisikan sebagai serangkaian proses dalam mencapai, menjalankan, membuat atau digunakan dalam aktivitas kekuasaan. Sedangkan kebijakan diritikan sebagai hasil dari serangkaian proses politik sebagai pedoman pelaksanaan, tata cara untuk menjalankan kekuasaan. Ketiganya element tersebut berada dalam lingkup sebuah negara. Negara didefinisikan sebagai unsur atas geografi yang dapat dikenali berada dalam sebuah ruang, tempat, dan wilayah.¹⁹ Berdasarkan konsep tersebut, aktivitas kenegaraan memiliki keterkaitan satu sama lain dalam sebuah ruang geografi dan proses politik. Anggapan tersebut menjadi salah satu acuan mengapa unsur-unsur geografi pada sebuah negara mencerminkan kepentingan dan kebijakan suatu negara.²⁰

Frederich Ralzel memandang pergerakan geopolitik seperti sebuah organisme hidup, dimana untuk berkembang sebuah negara membutuhkan ruang untuk ditempati oleh sekelompok individu untuk terus tumbuh. Pendefinisian tersebut kemudian dikembangkan Rudolf Kjellen seorang akademisi politik Swedia memandang bahwa geopolitik merupakan *staten for lifsform* atau diartikan sebagai sesuatu yang hidup dan dinamis. Konsep tersebut, kemudian dikembangkan oleh Karl Haushofer yang menekan pentingnya nasionalisme dalam memahami perkembangan sebuah negara.

¹⁹ 2017 J. Priyono & P. Yusgiantoro, Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi, Ed. Oleh M.Si (Han) Dan Juniawan Priyono, S.Si. Dan Ph.D. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A. (Bogor, N.D.).

²⁰ Sukma Perdana Prasetya, "Geografi Politik Sebagai Penguatan Wawasan Kebangsaan," Buku, 2015,

Karl memandang bahwa Geopolitik merupakan sebuah aktifitas politik yang menekan pada pendistribusian kekuasaan negara terhadap seluruh entitas didalamnya termasuk daratan tanah, periran maupun sumber daya.²¹ Dalam perkembangannya konsep ini diuraikan dalam berbagai makna baik secara geografi maupun politik. Sehingga, konsep ini tidak bersifat linier melainkan memiliki pemaknaan yang cukup kompleks. Namun, dalam berbagai diskusi mengenai geopolitik, identitas suatu negara dipengaruhi secara deterministik oleh aspek geografis yang menjadi impulsnya. Identitas sendiri dimaknai sebagai sebuah tinjauan yang dapat dipelajari dari sejarah geografi dan nilai-nilai yang sedang berlangsung dan budaya strategis suatu bangsa. Seokarno mendefinisikan bahwa geopolitik merupakan sebuah pengetahuan keadaan, segala sesuatu yang berhubungan *geografische constellatie*.²²

Dalam perkembangannya, konsep geopolitik memiliki pendefinisian yang cukup luas dan kompleks cenderung berubah sesuai dengan kondisi politik global. Seperti yang di dijelaskan oleh Mackinder, yang menyatakan bahwa "*Barang Siapa Menguasai Daerah Jantung Yaitu Eurasia Akan Menguasai Dunia Untuk menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat yang besar sebagai prasyaratnya*". Teori Geopolitik Mackinder ini dinamakan *hearthland theory*, dan diadopsi oleh Adolf Hitler sebagai pembenaran pergerakan ekspansionis german pada saat itu. Sedangkan, Nicholash J. Spykman, mendefinisikan dalam kasus yang

²¹ Arjuna Putra Aldino, "Geopolitik: Teori Dan Kajian,".

²² Hasto Kristiyanto, Geopolitik Bung Karno Progressive Geopolitical Coexistence, Vol. 1 (Bpgpr, 2023).

berbeda yang dinamakan Teori Rimland, menurutnya geopolitik merupakan strategi yang diperlukan untuk menguasai daerah pinggiran yang dianggap sebagai kunci bagi penguasaan hegemoni geopolitik global.²³ Fenomena perkembangan tersebut, menunjukkan geopolitik memiliki keterkaitan dengan identitas, perilaku dan interaksi aktor-aktor negara dan faktor geografi dengan pengaruh dominan. Menurut Defarges gagasan dan materialisasi geopolitik berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Seiring dengan kemajuan zaman, dinamika geopolitik baik internasional maupun domestik, telah berpengaruh langsung pada bidang keamanan, ekonomi, politik, militer dan kehidupan sosial. dinamika tersebut mendorong pengembangan konsep geopolitik di setiap negara sebagai salah satu alternatif dalam mencapai kepentingan negara yang lebih komprehensif untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat asimetris (berat sebelah).

Berdasarkan pendefinisian diatas, konsep dasar geopolitik banyak digunakan untuk menggambarkan sebuah negara sebagai aktor dalam pengambilan keputusan yaitu mencakup aspek pertahanan negara, demokrasi dan politik. Perkembangan geopolitik yang dinamis menjadi arus utama bagi suatu negara dalam mencapai kepentingannya terhadap negara negara tertentu melalui pendekatan Geopolitik. dimana, setiap negara perlu untuk melindungi dan memberikan jaminan atas kebijakan yang telah di sepakati yang melekat pada kekuatan sebuah negara. Dari pemikiran diatas, penulis menggunakan konsep geopolitik sebagai dasar analisa penelitian ini untuk mengkaji

²³ Nirmalya Das, "Geopolitical Theories: Heartland And Rimland," 1975.

kebijakan pertahanan pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014-2019. Konsep ini akan memberikan gambaran dalam memahami arah kebijakan pertahanan berdasarkan pada nilai geopolitik dalam mencapai visi poros maritim dunia. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis terfokus pada kebijakan pertahanan maritime pada pemerintahan Joko Widodo dengan mengaitkan teori wawasan kombinasi (*rimland theory*) yang digagas oleh Nicholas J. Spykman dengan gagasan bahwa “*negara membutuhkan sebuah kekuatan gabungan diantaranya kekuatan darat, laut dan udara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi negara tersebut*”.²⁴

Dalam menjelaskan hubungan kebijakan pertahanan dan kepentingan nasional dalam visi poros maritim penulis juga menggunakan konsep kemaritiman yang digagas oleh Alferd Mahan seorang admiral angkatan laut AS yang menulis buku dengan judul *the influence of sea power upon history*. Mahan menjelaskan bahwa “*unsur penting dalam mencapai kepentingan nasional adalah memberdayakan kekuatan perairan yang dimiliki oleh negara. apabila, kekuatan tersebut diberdayakan maka akan memiliki dampak positif bagi negara dalam meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan*”. Konsep ini dinamakan *sea power theory* dimana penggunaannya ditujukan dalam penegakan hukum laut seperti perompakan, pencurian sumberdaya dan penyelundupan yang menekan pentingnya perairan sebagai kekuatan nasional.²⁵ Secara keseluruhan, ide dan gagasan geopolitik memiliki dampak signifikan

²⁴ Hasto Kristiyanto, Geopolitik Bung Karno Progressive Geopolitical Coexistence.

²⁵ Captain A. T. Mahan, “The Influence Of Sea Power 1660 - 1783 - Capt Alfred Mahan, Usn” (Boston, 1890).

terhadap proses pelaksanaan berbangsa dan bernegara. Dengan mengaitkan konsep-geopolitik yang telah dijelaskan diatas, penulis akan menfokuskan analisisnya terhadap kebijakan pertahanan pemerintahan Joko Widodo dalam mengupupayakan terwujudnya kepentingan nasional untuk membangun Indonesia sebagai poros mairitim. Konsep Indonesia sebagai poros maritim menekan pada pengelolaan perairan. Sehingga, analisa geopolitik dapat membantu peneliti dalam menjelaskan kondisi-kondisi yang memungkinkan terhadap proses dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang strategis.²⁶

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakann yaitu kualitatif eksplanatif yang merupakan model penelitian untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis yang dihasilkan dari fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif akan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif yang berfokus penjelasan dan proses penelitian. Menurut Jujun S. Suriasumantri penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui sebab akibat atas fenomena yang terjadi. Metode kualitatif eksplanatif memiliki karakteristik pendeskripsian realitas sosias yang baik.²⁷ Dengan ini, penelitian akan lebih mudah menginterpretasikan makna pada fokus kajian. kelebihan dari penelitian eksplanatif ialah dalam analisisnya tidak hanya mendeskripsikan

²⁶ Pedro Sanchez Herraез, "21st Century: The Return To The Struggle For Rimland?," Ieee Analysis Paper, 2021, 1–22.

²⁷ M.A Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press, 2020, [https://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf](https://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.Pdf).

tentang kondisi objek kajian, namun juga mampu mengidentifikasi dan interpretasi data yang telah di deskripsikan sebelumnya. Menurut Bogdan dan Biklen, Metode kualitatif sangat cocok dengan tujuan penelitian ilmu sosial dimana keduanya akan berpengaruh pada proses *multiple meaning* dari pengalaman individu, makna sosial dan history yang dibangun karena tidak melakukan rekayasa situasi. Dengan ini penelitian kualitatif deskriptif mencakup kontruksi realitas sosial dan makna budaya yang berfokus pada interaktif Objek kajian yang dipilih dalam penelitian.²⁸

1.7.2 Metode Analisis data

Metode analisis data penelitian menggunakan data sekunder, dimana dalam menyelesaikan penelitian, penulis mengelolah dan menyajikan data yang telah ditulis sebelumnya dari catatan dokumentasi, paper dan journal yang sesuai dengan focus kajian. Penggunaan data sekunder dilakukan untuk mensinergikan beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literature maupun data lain yang telah disiapkan. Sistematika dalam analisis data sekunder berpaku pada pedoman yang jelas. Namun, prinsip setiap data dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dengan mengkaitkan satu sama lain dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik. Kemudian data-data yang telah didapatkan akan dianalisa untuk menghasilkan kesimpulan dari penelitian.

²⁸ Syafrida Hafni Sahir, Metode Penelitian, 2022.

1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis menggunakan ruang lingkup penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Dengan ini nantinya penelitian akan fokus untuk menjawab pertanyaan penelitian diantaranya:

1.7.3.1 Batasan Waktu

Visi Indonesia sebagai poros maritime merupakan cita-cita presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai *World Maritime*. Presiden Joko Widodo terpilih sebagai presiden Indonesia pada pemilu 2014 lalu merencanakan pembangunan sektor perairan dalam berbagai aspek pada masa pemerintahannya dalam rentang waktu tahun 2014-2019. Menurutnya, laut sebagai basis kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia merupakan kata kunci untuk mencapai kemajuan dan meraih cita-cita mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Kepulauan Nusantara. Namun, fakta yang terjadi menjelaskan bahwa pertahanan sector maritim masih tidak efektif karena masih banyak aktivitas kriminal yang terjadi di perairan Indonesia. Dengan itu, penelitian ini akan berfokus pada kebijakan pertahanan pemerintahan Joko Widodo dalam membangun Indonesia sebagai poros maritime pada periode pertamanya yaitu tahun 2014-2019.

1.7.3.2 Batasan materi

Dalam penelitian penulis memberikan batasan pembahasan agar tidak menyebar dan berfokus pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini

hanya menjelaskan kebijakan pertahanan maritime pemerintahan Joko Widodo pada periode 2014-2019 dengan menganalisis kebijakan yang ditetapkan sebagai upaya membangun poros maritime dunia. Dalam mengupayakan visi tersebut, kebijakan pertahanan maritime merupakan kunci utama dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara untuk terhindar dari ancaman baik dari dalam ataupun luar.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *tracking process* dalam menganalisis data yang di dapatkan dari sumberdata tertulis berupa buku, journal, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini merupakan salah satu teknik pengolahan data yang digunakan untuk menjelaskan dan menangkap factor-faktor yang memepengaruhi hasil penelitian. Data hasil penelusuran akan dianalisis dan menghasilkan sebuah temuan baru yang nantinya dideskripsikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan ini, peneliti akan memanfaatkan sumber data yang dinggap relevan terhadap penelitian dengan menggunakan kerangka dasar konsep yang telah ditetapkan menggunakan teknik *library reseach* yang akan mendukung sumberdata pada penelitian ini.

1.8 Argumen Pokok

Dalam penelitian, penulis berpendapat bahwa negara sebagai aktor yang bertanggung jawab memastikan kebutuhan, melindungi dan menjaga keutuhan dan kedaulan bangsa dengan mengelolah kedaulatan secara efektif dan terstruktur. Dalam konsep geopolitik negara diasumsikan sebagai sebuah wadah organisme yang

membutuhkan sebuah ruang untuk hidup. Sehingga dalam menjamin eksistensi suatu negara, proses perumusan kebijakan dan mewujudkan kepentingan merupakan proses yang krusial. Dengan asumsi tersebut, dalam menjamin pelaksanaan tugas dan kewajibannya, membutuhkan sebuah instrumen yang sesuai dan efektif dalam menjamin kebutuhan negara dalam mencapai kepentingan. Dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden, penelitian ini akan menganalisis konsep geopolitik untuk mengeksplorasi keterkaitan dalam perumusan kebijakan pertahanan dan upaya dalam mencapai kepentingan nasional. Dengan lahirnya ambisi untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia pada pemerintahan Joko Widodo, negara harus siap dalam segala proses pencapaiannya terutama dalam menjaga dan melindungi seluruh wilayah kedaulatan dengan maksimal dan efektif. Sehingga, posisi pertahanan menjadi kunci utama dalam kepentingan nasional ini. Oleh sebab itu, perlu adanya sebuah analisis yang dapat mengidentifikasi proses perumusan kebijakan pertahanan dan kepentingan dalam mencapai Indonesia sebagai poros maritim sebagai dukungan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis membagi pengelompokan menjadi beberapa bagian seperti:

Table 2.2 Sistematika Penulisan

BAB	POKOK BAHASAN	SUB BAB
BAB I	Pendahuluan	1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah

		<ul style="list-style-type: none"> 1.3. Tujuan Penelitian 1.4. Manfaat Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1.4.1. Manfaat Akademis 1.4.2. Manfaat Praktis 1.5. Penelitian Terdahulu 1.6. Kerangka Teori Dan Konsep <ul style="list-style-type: none"> 1.6.1. Geo-Politik 1.7. Metode Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1.7.1. jenis penelitian 1.7.2. metode analisis 1.7.3. Ruang Lingkup Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1.7.3.1. Batasan waktu 1.7.3.2. Batasan materi 1.7.4. Teknik Pengumpulan Data 1.8. Argumen Pokok 1.9 Sistematika Penulisan
BAB II	Interaksi antara geopolitik, dan kepentingan nasional serta implikasinya terhadap perumusan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Perkembangan Geopolitik Dan Keterkaitanya Terhadap Kepentingan Nasional 2.2 Posisi Indonesia Dalam Kerangka Geopolitik 2.3 Sejarah Kemaritiman Dan Lahirnya Ide Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia 2.4 Implikasi Posisi Geografis Terhadap Perumusan Pertahanan Indonesia
BAB III	Kebijakan pertahanan pemerintahan Joko Widodo	<ul style="list-style-type: none"> 3.1 Kebijakan Pertahanan Maritime Pemerintahan Joko Widodo 2015-2019 <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1 Kebijakan Pembangunan Pertahanan 3.1.2 Kebijakan Pemberdayaan 3.1.3 Kebijakan Pengerahan 3.1.4 Kebijakan Regulasi 3.1.5 Kebijakan Anggran Pertahanan

		<p>3.2 Identifikasi arah kebijakan pertahanan</p> <p>3.3 Strategi Dan Agenda Prioritas Kebijakan Pertahanan</p> <p>3.4 Hambatan Dan Tantangan Pemerintah Indonesia</p>
BAB VI	Analisis geopolitik kebijakan pertahanan dalam mewujudkan indonesia sebagai poros maritim	<p>4.1 Analisis Faktor Faktor Geopolitik Dalam Perumusan Kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia</p> <p>4.2 Analisis Implikasi Geopolitik Terhadap Strategi Dan Kebijakan Pertahanan</p> <p>4.3 Analisis Strategi Geopolitik Dalam Mewujudkan Ambisi Poros Maritim Dunia</p>
BAB V	Penutup	<p>1.1 Kesimpulan</p> <p>1.2 Saran</p>

